

SEKJEN KEMENSOS MINTA PENDATAAN DIPERCEPAT

## 7.359 Keluarga Tak Layak Terima BST Kemensos



Sekjen Kemensos bersama Bupati pantau penyaluran BST.

KR-Istimewa

**NGAGLIK (KR)** - Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan jaring pengaman sosial, berupa Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan ini berupa uang yang diberikan langsung kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan atau kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Untuk melihat sejauh mana penyaluran BST, Sekjen Kemensos Hartono Laras didampingi Bupati Sri Purnomo memantau proses penyaluran bantuan BST di dua tempat di wilayah Sleman. Yakni di Balai Desa Sinduharjo Ngaglik Sleman dan Balai Desa Caturharjo Sleman, Sabtu

Penerima Manfaat (KPM). Namun ketika diverifikasi oleh Dinsos Sleman ada 7359 KPM yang tidak layak untuk menerima. "Jadi yang menerima sebanyak 27.422 KPM. Hari ini akan menyalurkan 3.973 KPM," ujarnya.

Bupati berharap seluruh warga Sleman yang masuk dalam KPM untuk datang dan mengambil bantuan BST tersebut. "Masih ada 1.955 yang belum mengambil BST ini, kami harap perangkat desa agar segera melakukan penyisiran terkait siapa yang menerima undangan dan belum mengambil bantuan tersebut," katanya, seraya meminta arahan dari Sekjen Kemensos terkait sisa kuota

7.359 KPM yang tidak layak menerima BST di Kabupaten Sleman.

Sementara Hartono Laras mengapresiasi upaya Pemkab Sleman untuk mempercepat penyaluran BST. "Kami berharap bantuan tahap pertama selesai dengan cepat sehingga dapat masuk dalam tahap kedua pada bulan Juni, dan mungkin akan masuk tahap ketiga. Kita terus melakukan langkah cepat sambil membenahi terkait dengan data. Termasuk kuota sisa KPM yang tidak layak diterima di agar segera dipercepat pendataan. Sehingga kuota tersisa dapat digantikan oleh warga lain yang berhak menerima bantuan," jelasnya. (Has)-a

## Disdukcapil Buka Kembali Perekaman E-KTP

**SLEMAN (KR)** - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman membuka kembali pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP mulai Selasa (2/6). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penerapan kebijakan New Normal di masa pandemi Covid-19 dan sesuai dengan arahan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman Jazim Sumirat mengatakan, pelayanan perekaman KTP elektronik tetap mengikuti protokol kesehatan Permenkes tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Petugas dilengkapi baju hazmat lengkap, peralatan perekaman disinfektan dengan cairan alkohol 70 persen setiap selesai dipakai untuk merekam. "Ruang perekaman juga

didesain agar tetap menjaga *social distancing* dan meminimalisasi kontak langsung antara petugas dengan pemohon," jelasnya di Sleman, Senin (1/6).

Jazim menerangkan, petugas pelayanan berhak menolak pemohon yang tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan SOP pelayanan yang telah ditetapkan. Pendaftaran perekaman KTP elektronik, tetap dilakukan secara online melalui nomor pendaftaran 089526958822. Dalam satu hari juga dibatasi maksimal 20 orang.

"Untuk pelayanan administrasi kependudukan, Permendagri nomor 19 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan mengamandatkan perubahan spesifikasi materi bahan baku produk pelayanan administrasi kependudukan. Sebelumnya menggunakan bahan baku *security printing* menjadi bahan baku kertas HVS 80 gram ukuran A4 warna putih," jelasnya.

Menurut Jazim, perubahan spesifikasi tersebut diikuti perubahan sistem pelayanan, yakni masyarakat dapat mencetak secara mandiri produk layanan berupa Kartu Keluarga dengan kertas HVS 80 gram dengan warna putih. "Seluruh produk layanan adminduk ditandatangani secara digital oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sistem pelayanan dilakukan dengan syarat pemohon harus memberikan alamat email pribadi, kemudian aplikasi pelayanan secara otomatis mengirimkan email berupa PIN dan link input pencetakan dokumen.

Selanjutnya pemohon dapat melakukan pencetakan dengan cara mengklik link cetak dokumen untuk masuk ke sistem layanan online Kemendagri di [layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id](http://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id), kemudian memasukkan PIN dan mencetaknya. "Pencetakan produk layanan administrasi kependudukan ini paling lambat tanggal 1 Juli 2020," tandas Jazim. (Aha)-a

## Hari Lahir Pancasila di UGM dengan Upacara Daring

**SLEMAN (KR)** - Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6) pagi di halaman utara Balairung UGM. Namun, hanya petugas upacara, beberapa perwakilan sivitas akademika UGM, serta tim teknis saja yang hadir langsung di sana. Pembina upacara serta para peserta upacara mengikuti secara daring melalui platform Google Meet serta siaran di saluran Youtube UGM.

Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng IPU ASEAN Eng selaku pembina upacara menyampaikan amanatnya, bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, nilai-nilai Pancasila masih tampak dalam kehidupan se-



Petugas upacara mengibarkan Bendera Merah Putih di halaman Gedung Pusat UGM.

KR-Istimewa

hari-hari masyarakat Indonesia, bahkan semakin kuat. Mereka saling membantu, berinisiatif gotong-royong tanpa diperintah, tanpa melihat agama, ras, maupun asal-usul.

"Kita baca di berbagai media, para pemuka agama serempak mengedu-

kasi masyarakat agar melakukan ibadah di rumah. Selain itu, kemanusiaan ditunjukkan dalam banyaknya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai relawan. Donasi juga terus digalang masyarakat secara gotong-royong dari berbagai platform," ungkapnya. (Dev)-a

## 300 Wajib Pajak Minta Keringanan PBB

**SLEMAN (KR)** - Sebanyak 300 wajib pajak mengajukan keringanan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mayoritas pemohon mengajukan keringanan karena kesulitan ekonomi, kondisi objek maupun untuk mendukung program pendidikan.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Haris Sutarto SE MT mengatakan, sampai saat ini sudah tercatat ada 300 pemohon yang mengajukan keringanan PBB. Selain itu juga ada beberapa permohonan keringanan pajak air tanah dan reklame.

"Kemungkinan jumlah pemohon ini akan bertambah. Untuk PBB, biasanya mendekati jatuh tempo, pemohon yang mengajukan keringanan bertambah," kata Haris di Sleman, Senin (1/6).

Menurutnya, para pemohon yang meng-

ajukan pengurangan PBB ini di antaranya pensiunan, warga tak mampu. Sedangkan untuk pajak air tanah dan reklame, pemohon meminta keringanan pokok pajak. "Para pemohon mengajukan keringanan karena mengalami kesulitan ekonomi. Namun ada juga yang memang masuk kategori mendukung program pemerintah atau kemasyarakatan. Untuk pengurangan PBB, mulai dari 15 persen hingga 50 persen," ujarnya.

Dikatakan, kontribusi PBB dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun kemarin Rp 74 miliar. Sedangkan untuk reklame sekitar Rp 10 miliar dan pajak air tanah Rp 3,2 miliar. "Untuk kontribusi PBB di Kabupaten Sleman cukup besar. Sedangkan ketetapan pokok PBB tahun ini Rp 87,367 miliar dengan wajib pajak 633.103," tuturnya. (Sni)-a

## PEMKAB DAN PMI ADAKAN RAPID TEST 4 Warga Ngemplak Positif Covid-19

**NGEMPLAK (KR)** - Pemkab melalui Dinas Kesehatan Sleman bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan rapid test di Desa Wedomartani Ngemplak, Sabtu (30/5). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bidang Relawan PMI Pusat Sasongko Tedjo, Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo dan Ketua PMI Sleman dr Sunartono.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman dr Novita Krisnaini menjelaskan, kegiatan ini meru-

upakan upaya tracing terhadap warga di Kecamatan Ngemplak. Sebelumnya ada 4 orang di Kecamatan Ngemplak yang dinyatakan positif Covid-19.

"Selanjutnya akan kembali dilakukan kegiatan serupa pada tanggal 4 dan 9 Juni 2020. Kegiatan tersebut rencananya ditujukan untuk petugas rapid test

yang bertugas di GOR Pangukan dan petugas pasar di Kabupaten Sleman," jelas dr Novita.

Sementara Sasongko Tedjo mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pemkab Sleman bersama PMI. "Kami siap membantu pemerintah daerah dalam upaya memerangi penyebaran Covid-19. Ada

5.000 relawan PMI di seluruh Indonesia dikerahkan untuk membantu pemerintah menangani wabah Korona. Di sini peran PMI bukan menyelenggarakan rapid test. Itu bukan wewenang kami. Peran kami membantu dekontaminasi kepada petugas setelah melakukan rapid test," jelasnya. (Has)-a

## DUA OBJEK WISATA SEGERA DIBUKA

### Pelaku Pariwisata Harus Siapkan Protokol Kesehatan

**SLEMAN (KR)** - Rencana dibukanya objek wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko menjadi angin segar di sektor pariwisata. Sejauh ini rata-rata hotel juga sudah beroperasi meski Sumber Daya Manusia (SDM) belum semua dipekerjakan kembali.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sleman Joko Paromo menjelaskan, pengelola hotel siap terkait akan dibukanya dua objek wisata di Sleman. PHRI juga melakukan sejumlah persiapan terkait kesehatan dan keselamatan serta tetap mengikuti prosedur protokol pencegahan penyebaran virus Korona.

"Kami telah menyediakan tempat cuci tangan sesuai dengan prosedur. Serta penggunaan masker, menjaga jarak dan perlunya penjagaan dan pengawasan dalam antrean. Tentunya dibutuhkan tenaga ekstra untuk mempersiapkan hal itu semua," terang Joko Paromo di Sleman, Senin (1/6).

Menurut Joko, agar perekonomian bangkit yang paling utama tempat wisata harapannya segera dibuka.

Namun ia tak menampik jika hal itu memang berat dengan kondisi seperti ini. "Namun kami tetap berusaha dan rebranding lagi tentang pariwisata di DIY, khususnya Sleman," tandas Joko.

Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan, penerapan protokol kesehatan sangatlah penting jika objek wisata dibuka kembali untuk umum. Para pelaku wisata juga perlu memberikan panduan secara rinci kepada pengunjung. Agar para pengunjung yang datang tidak ada kekhawatiran. "Ketika akan buka, ya kami mohon aktivitas dan tempatnya dipersiapkan betul. Yang terkait dengan protokol kesehatan disiapkan betul," tandasnya.

Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata Sleman akan mengumpulkan semua pelaku wisata. Baik hotel, restoran, dan pihak lainnya untuk membuat kesepakatan penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Direktur Utama PT TWC BP RB Edy Setijono mengemukakan membuka kembali operasi-

nal Taman Wisata Candi beserta fasilitasnya. Pembukaan tersebut tentunya memperhatikan imbauan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian BUMN dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Taman Wisata setelah dibuka nanti siap menuju nor-

mal baru pariwisata. Saat ini dilakukan berbagai persiapan dengan memperbaiki dan meningkatkan standar kualitas pelayanan, menuju pariwisata yang bersih, sehat, dan aman untuk menerima seluruh wisatawan yang berkunjung di Candi," ujarnya. (Aha/Isw)-a

**"MULIA"**  
AUTHORIZED MONEY CHANGER  
[www.muliamoneychanger.co.id](http://www.muliamoneychanger.co.id)

**PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19**

GRAND INNA MALIBORO HOTEL JL. MALIBORO 60 YOGYAKARTA  
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314  
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND  
TELP : 4331272  
BUKA SETIAP HARI : SENIN S/D MINGGU

JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA  
TELP : 0274 - 5015000  
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

**TANGGAL 30/MAY/2020**

CURRENCY	BELI/		JUUAL
	BN	TC	
USD	14.550	-	14.900
EURO	16.050	-	16.400
AUD	9.650	-	9.900
GBP	17.800	-	18.400
CHF	15.050	-	15.400
SGD	10.275	-	10.575
JPY	134,00	-	140,00
MYR	2.950	-	3.350
SAR	3.500	-	3.900
YUAN	1.950	-	2.200

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah  
Menerima hampir semua mata uang asing

**DPRD KABUPATEN SLEMAN**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

### New Normal Pilkades di Tengah Pandemi

**SLEMAN (KR)** - New normal tidak hanya berlaku kepada kehidupan bermasyarakat. Namun new normal atau tatanan baru juga berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di tengah pandemi Covid-19. Dalam proses tahapan maupun tata pelaksanaan harus berubah dengan menyesuaikan protokol kesehatan.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDI Perjuangan Budi Sanyata SPd mengatakan, pandemi Covid-19 ini membuat perubahan pada pranata sosial di masyarakat. Semua masyarakat supaya beradaptasi dengan protokol kesehatan sebagai dasar pelaksanaan baik dalam layanan publik, perdagangan dan ekonomi, jasa layanan serta dalam peribadatan.

"Dengan kondisi pandemi ini, kehidupan masyarakat berubah. Kita semua harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan," kata Budi di Sleman, Senin (1/6).

Pada akhir Maret kemarin, sebenarnya Sleman mempunyai hajat besar yaitu Pilkades secara serentak di 49 desa. Bahkan Pilkades kali ini berbeda dengan sebelumnya karena tidak lagi mencoblos, melainkan secara elektronik yaitu menyentuh di layar monitor. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, Pilkades secara e-voting ditunda.

"Penundaan itu sesuai SK Bupati nomor 22/Kep KDH/A/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik se-Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Kadinas PMD. Rencananya pilkades digelar

akhir Agustus 2020 dengan catatan, situasi cukup kondusif," ujarnya.

Penundaan pilkades dengan dihentikannya tahapan pilkades, juga membuat tatanan baru bagi calon. Bagi perangkat desa yang mencalonkan menjadi kades, pencabutan cuti menjadi kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

"Ternyata Pj kades dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya tidak sama. Ada Pj kades yang mencabut cuti perangkat desa yang mencalonkan sebagai kades, tapi ada juga yang tidak mencabut cuti perangkat desa," paparnya.

Sebagai contoh yang cutinya dicabut dan kembali menjabat yaitu di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah. Sedangkan cutinya tidak dicabut sehingga belum kembali menjabat yakni di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak. "Baik yang mencabut maupun yang tidak keduanya tidak salah dalam menggunakan kewenangannya. Namun tentunya menimbulkan pertanyaan di masyarakat, baik bagi yang mencabut maupun yang tidak. Ini ada apa?," tanya anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman ini.

Dengan keadaan tersebut bisa juga muncul new normal bahwa perangkat desa yang maju harus mengundurkan diri. Pihaknya berharap penggunaan kewenangan Pj kades tetap berdasarkan prinsip keadilan sehingga tidak ada yang dirugikan. "Saya rasa perlu kejelasan supaya tidak ada yang merasa dirugikan terhadap kebijakan dari Pj kades," tegasnya. (Sni)-a

**Budi Sanyata SPd**  
Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDI Perjuangan

**Budi Sanyata SPd**  
KR-Saifullah Nur Ichwan